


LUTHFI PATTIMURA & PAUL AH SIAHAAN

IKN
BUKAN
KOTA
FISIK

An aerial photograph of a city under construction at sunset. The sky is filled with dramatic, dark clouds, with a bright orange and yellow glow from the setting sun on the left. In the foreground, a multi-lane highway runs vertically. To the right, there are large construction sites with piles of materials and green safety netting. In the middle ground, several modern buildings are under construction, with cranes visible. In the background, a large, dark, modern building with a unique, angular design stands out against the horizon. The overall scene depicts a city in the process of being built.

IKN BUKAN KOTA FISIK

KOTA IDEOLOGIS BANGSA

Luthfi Pattimura & Paul AH Siahaan

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
oleh PT Lintas Media Infrastruktur

Cetakan pertama, Januari 2025

Editor:

Pepih Nugraha

Periset Foto:

Roy Afriansyah

Desainer Grafik:

Salomo Tobing

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN No XXX-XXX-XX-XXXX-X

Diterbitkan oleh

PT Lintas Media Infrastruktur

Copyright© 2025

Majalah Lintas

www.majalahlintas.com

Kompleks Bina Marga Blok B No.6, Kelurahan Cikokol,

Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15117

021-7226321

Pengantar Penerbit

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur—Ibu Kota Nusantara (IKN)—sering dikaitkan dengan momentum transformasi bangsa; dari orientasi pembangunan yang tadinya Jawa sentris ke Indonesia sentris.

Selain IKN yang merepresentasikan simbol identitas bangsa, satu hal yang dilihat jelas oleh Paul HA. Siahaan dan Luthfi Pattimura, kedua penulis buku ini adalah, bentuk pemberlakuan efek ideologis, sesuai biopikir alinea keempat UUD 1945, di IKN;

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Itu bukan sekadar bunyi. Itu adalah kebijakan negara yang tak boleh retak oleh ledakan ambisi manusiawi. Dalam motif ini, kekuatan gagasan pindah ibu kota negara adalah untuk membenamkan ancaman terhadap masa depan bangsa supaya tidak membumbung.

Sementara ini, di saat pembangunan IKN ditafsirkan dalam kategori teknis kota fisik—kedua penulis justru menysisir dasar filosofi yakni kota sebagai alternatif riil ikatan emosional kebangsaan. Sehingga, IKN bagi mereka adalah Kota Ideologis.

Dari sudut pandang mereka, bangsa Indonesia saat ini sedang menyeberangi garis pengalaman ketertinggalan. Penyeberangan lewat kesigapan layanan infrastruktur. Bahwa lapisan makna penyeberangan ke Indonesia sentris itu pantul memantul dengan sebuah kota yang berakar pada kehalusan ideologi dan keluasan artefak Nusantara.

Jika kita ingin menemukan apa arti energi revolusioner untuk mengeksplorasikan cinta tanah air dan kebersatuan mendalam dari kampung-kampung Nusantara di sebuah kota, kita hanya dapat menemukannya dalam apa artinya penelusuran kedua penulis menulis buku ini, *IKN Bukan Kota Fisik*.

Dalam buku ini, kedua penulis memandang pembangunan IKN sebagai tindakan penutup dalam babak gagas-menggagas pemindahan ibu kota negara yang dimulai sejak 1957.

Di sini mereka menganggap semua elemen bangsa terikat bersama dalam proses pemusatan analisa pada penemuan kunci pemindahan ibu kota negara. IKN menjanjikan kemilauan simbol identitas bangsa sesuai azimat kemajemukan.

Majalah LINTAS menyampaikan terima kasih kepada kedua penulis, suatu kehormatan bagi Majalah LINTAS menerbitkan buku ini.

Jakarta, Desember 2024

PT Lintas Media Infrastruktur

Bagian 1

Nilai Melahirkan Gagasan

Jenis peristiwa yang mengepung sistem kerja sebuah ibu kota negara bisa banyak sekali. Ada kemacetan, polusi udara, kepadatan penduduk, kekumuhan sosial, ada degradasi kualitas lingkungan. Jakarta, ambil contoh, hampir saban hari dikepung oleh peristiwa alam dan sosial yang mengusik kebahagiaan para penduduk.

Melihat kondisi ibu kota negara sebagai simbol dari pusat kekuasaan, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat sosial-budaya dan simbol pusat ekonomi yang tidak nyaman, mengingatkan kita tentang nilai untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan yang berbanding lurus dengan ruang untuk tumbuh kembang.

Nilai melahirkan gagasan, dan gagasan para pemimpin bangsa terhadap ledakan ambisi manusiawi yang menimbulkan bermacam peristiwa sosial, membawa kita pada 17 Juli 1957; Saat itu, Presiden Soekarno menggagas pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, ketika ia berada di Palangka Raya untuk meresmikan kota tersebut sebagai Ibu kota Kalimantan Tengah.

Kemudian, pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Awalnya, dimaksudkan untuk pusat pemerintahan. Akan tetapi tidak sempat terwujud.

Pada 2 Desember 2009, dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangka Raya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemusatan perhatian terhadap pemindahan ibu kota negara ke wilayah lain, untuk dibahas secara terbuka dan komprehensif.





Istimewa

Tugu Soekarno menjadi saksi rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pada 17 Juli 1957, Bung Karno menancapkan suatu tonggak pembangunan Palangka Raya menjadi modal dan model bagi pembangunan banyak kota di Indonesia.

Pada Agustus 2010, Presiden SBY menawarkan 3 skenario yang perlu didiskusikan, yaitu skenario pertama mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Pilihan atas opsi ini berkonsekuensi pada pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, pemukiman, dan tata ruang wilayah.

Skenario kedua, membangun ibu kota yang benar-benar baru atau totally new capital. Sedangkan skenario ketiga, ibu kota tetap di Jakarta, tetapi memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.

Selanjutnya, pada 2013 Presiden SBY kembali menyodorkan skenario pemindahan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta, dengan tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu kota Negara.

Mengambil penekanan makna pemberlakuan efek ideologis bagi

suatu perubahan yang struktural bagi masa depan bangsa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya membuka ingatan atas gagasan tiga pendahulunya, dengan meminta izin dari rakyat untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Di sini, pemindahan ibu kota negara ternyata bukan gagasan baru. Juga, bukan pada akhirnya berarti hanya tentang sebuah lokasi baru. Melainkan, pemindahan karena korelasi umum antara nilai kehidupan masa depan bangsa dengan ruang untuk tumbuh kembang. Dan juga, ibu kota negara yang merepresentasikan simbol identitas bangsa.

Titik referensi dari korelasi umum, bisa dilihat pada Amerika Serikat, yang memindahkan ibu

suatu perubahan yang struktural, adalah mustahil.

Terlepas dari yang konstan dalam sejarah perjalanan bangsa mana pun di dunia adalah segalanya berubah; Saat ini, kita tidak bisa berlama-lama di ruang sempit pas-pasan, jika Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, terlalu luas untuk bernapas, untuk menerima permintaan baru, dan terlalu luas bagi pemerataan pembangunan nasional.

Pastilah, para ahli sudah merunut habis bagaimana timbul-tenggelam dan kepunahannya kota-kota dalam sejarah peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. Demikian pula banyak yang *mules* oleh perbincangan panjang soal 60% dari populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Dengan mengarahkan mata pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), buku ini merupakan cara kami mendekati suatu bahan naratif—semacam catatan perdana dalam sejarah—tentang pembangunan IKN sebagai tindakan penutup dalam babak gagasan-menggagas pemindahan ibu kota negara yang dimulai sejak tahun 1957.

Jadi, ini buku reflektif; cerminan dari pelipatgandaan harapan terhadap ibu kota negara yang merepresentasikan simbol identitas bangsa, dan pemindahan ibu kota negara sebagai momentum transformasi bangsa, yang merefleksikan pemberlakuan efek ideologis sesuai biopikir alinea keempat UUD 1945.

Sesuai judulnya, *IKN Bukan Kota Fisik*, masalah ibu kota negara dan kota ideologis bangsa menjadi fokus sorotan buku ini.

Ibu kota negara itu ideologis, tetapi ideologis bukan ibu kota negara. Mesin kerja negara, pusatnya di ibu kota negara. Sedangkan pemberlakuan efek ideologis dari mesin kerja simbol kegiatan yang berurusan dengan negara bagi kesejahteraan rakyat, itu ideologis.

Adanya korelasi umum antara Jakarta dan pesimisme kota ideologis bangsa, *Bagian Dua* buku ini dilanjutkan dengan, *Urgensi Pindah*, setelah menerobos argumen-argumen mulai dari pemukiman kecil yang dulunya bernama ‘Sunda Kelapa’, kemudian kepadatan penduduk, kekumuhan sosial, banjir, kemacetan lalu lintas, polusi udara, tekanan lingkungan, untuk melihat tanggapan yang bersifat holistik mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Salah satu produk sampingan dari bagian kedua tentang modernisasi, urbanisasi dan melonjaknya penduduk adalah, pudarnya tenunan jaring ruang-ruang publik. Dengan

Jumlah penduduk Jakarta kian bertambah. Ruang untuk tumbuh kembang pun semakin berkurang. Karena Jakarta sebagai ibu kota negara terlalu ditimbuni dengan pembangunan fisik. Jakarta kemudian menjadi tak erat lagi jalin-menjalin dengan detail kehidupan ideologi. Dari sini, IKN bukan sekedar kota fisik.

begitu, *Bagian Tiga* buku ini, *Ruang Transformatif*, akan meneruskan tanggapan akademis yang merindukan ruang-ruang publik bagi jiwa kehidupan komunitas.

Berbagai ledakan ambisi manusiawi juga berujung tekanan lingkungan yang mengintai roh Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan instansi terkait, kemudian membuka portal untuk mengelola tantangan transformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dimengerti bahkan dikendalikan, demi keyakinan humanis-ideologis, dan mengisi *Bagian Empat* buku ini, *Portal Pengendalian Banjir dan Penanggulangan Ekologis*.

Aslinya, ibu kota negara harus merepresentasikan simbol identitas bangsa. Tanpa menyangkal eksistensi kota Jakarta sebagai Kota Proklamasi, gedung istana negara terasa lemah dari inti simbol identitas bangsa, tampak tandus dan kosong karena tidak berbicara secara langsung tentang kreasi anak bangsa dari lapangan artefak Nusantara. Di sini, pembangunan IKN merupakan panggilan Nusantara atas kehidupan-kehidupan di dalam kemajemukan.

Seperti halnya mata rakyat Indonesia tertuju pada kawasan Titik 0 Kilometer saat prosesi penyatuan air dan tanah, mata duniapun kini tertuju pada Indonesia semenjak dimulainya pembangunan IKN.

Bagaimanapun, lapangan artefak Nusantara mencakup realita universal, bukan realita konsep fisik gedung atau bangunan. Di mana melandasi lapangan artefak Nusantara, di sana ada landasan otoritas kebangsaan sebuah bangsa bernama bangsa Indonesia, sebagai

hal pertama dan yang utama di mata dunia. Dari sana, *Melandasi Lapangan Artefak Nusantara*, mengisi *Bagian Lima* buku ini.

Dengan memalingkan mata dari telur *ceplok* yang dagingnya di tengah tapi pinggir-pinggirnya seperti busa sebagai bukan Indonesia, pemindahan ibu kota negara juga merupakan momentum untuk menyegarkan pemberlakuan efek ideologis dari mesin kerja negara bagi rakyat yang melambai di sekitar biopikir alinea keempat UUD 1945.

Melihat ketimpangan wilayah dan kota, pemindahan ibu kota negara merupakan suatu momentum untuk bagaimana mengatasi ketimpangan. Karena Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, terlalu luas untuk menerima permintaan baru, dan terlalu luas bagi pemerataan pembangunan nasional, maka memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa, akan menunjukkan terjadinya perubahan; dari pembangunan yang tadinya berorientasi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Yang tadinya negara agraris akan menuju negara maritim global untuk menangkap peluang dari alur laut kepulauan Indonesia.

Pastilah, para ahli sudah merunut habis bagaimana timbul-tenggelam dan kepunahannya kota-kota dalam sejarah peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. Demikian pula banyak yang *mules* oleh perbincangan panjang soal 60% dari populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Mengingat keharusan adanya suatu medium, yang mengkomunikasikan pemberlakuan efek ideologis dalam pembangunan,

tiang revolusi karakter bangsa dipancangkan oleh infrastruktur secara besar-besaran dari pinggiran.

Pendekatan tersebut dengan segera menjadi bahasa pembangunan. Lihat; bagaimana kekuatan bahasa itu berbicara dari pinggiran, dan rakyat dari pinggiran menggunakan bahasa itu untuk berbicara.

Bukan hanya tentang konsekuensi pengisian revolusi karakter, melainkan berbicara tentang cara mengisi mangkuk-mangkuk madu bagi kebangkitan emosi kebhinekaan. Berangkat dari semboyan yang sah bernama Bhinneka Tunggal Ika bagi persatuan dan kesatuan bangsa, *Azimat Kemajemukan*, mengisi *Bagian Enam* buku ini.

Nilai melahirkan gagasan, dan gagasan kementerian infrastruktur—PUPR (kini PU)—yang menindaklanjuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi 16 Agustus 2019, adalah mereaktivasi cincin-teoritisi, untuk menentukan desain-acuan, visi perancangan, dan rencana pengembangan kawasan dengan penuh perhitungan.

Pengaruh estetika apa yang muncul bila kekuatan cincin-teoritisi dan representasi simbol identitas bangsa di ibu kota negara yang terpecah-pecah, digarap berdampingan?

Kota ideologis di sini tak ada kaitannya dengan produk teknis kota fisik, karena menyajikan desain, untuk memberlakukan efek ideologis dengan sumber energi, yang atraktif, di mana terjadi akumulasi dari berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, keuangan, sumber daya politik, sumber daya ekonomi

berkumpul, tidak ada pembatasan terhadap jumlah, dan menjadi kota yang terbuka dan atraktif bagi semua orang, bukan hanya ASN. Itulah yang menjadi sorotan kami dan mengisi *Bagian Tujuh* buku ini, *Kota Ideologis*.

Selain itu, dengan melihat produk teknis kota fisik yang tidak cukup memadai untuk menjelaskan kesadaran simbol identitas, *Bagian Delapan* buku ini berisi tema, *Mengukuhkan Reputasi Kota Dunia*, jika IKN akan dibangkitkan oleh simbol identitas bangsa menuju visi kota dunia untuk semua.

Kota yang bukan eksklusif, bukan khusus untuk ASN meskipun ada pusat pemerintahan, mengingat di dalam IKN sendiri ada fungsi-fungsi lain yang signifikan seperti fungsi komersial, ekonomi, sosial, olahraga, serta *mixed used*.

Walau tema-tema dalam buku ini adalah yang paling mungkin—mengingat buku ini merupakan catatan perdana dalam sejarah—namun pembaca dapat berkesimpulan, bahwa Indonesia akan memesonakan dunia dengan IKN yang berada di lapangan luas artefak Nusantara. *Selamat Datang di Nusantara*, menjadi *Bagian Sembilan*, sekaligus penutup buku ini.

Nilai melahirkan gagasan, dan gagasan-gagasan para pendahulu pendiri bangsa membangun peradaban, sudah tercatat dalam sejarah. Seperti halnya sejarah mencatat Jakarta sebagai Kota Proklamasi Kemerdekaan RI, sejarah akan mengukuhkan IKN sebagai pembuka horizon Kota Ideologis Bangsa.

